

# ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KAB.KUBU RAYA DESA SUNGAI ENAU

Putri Maharani

[b1033211039@student.untan.ac.id](mailto:b1033211039@student.untan.ac.id)

Universitas Tanjungpura

## ABSTRAK

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah. Pelaksanaan pengukuran dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian pengukuran menagacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan dibutuhkan beberapa rasio keuangan. Rasio Kemandirian menggambarkan ketrgantungan atau tidaknya daerah terhadap dana eksternal, Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Rasio Efisiensi perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai dari rasio kemandirian dikategorikan sedang dan dalam pola hubungan partisipasi karena berada diantara 50% - 57% pada tahun 2021-2024 karena tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan cukup mampu melakukan otonomi daerah, hasil dari rasio efektivitas dikategorikan tidak efektif karena kurang dari 75% berdasarkan rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas belum efektif, hasil dari Rasio Efisiensi dikategorikan sangat efisien karena berada <5% kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset desa ditinjau dari rasio efisiensi.

**Kata Kunci:** Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan.

## ABSTRACT

*The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is an instrument used as a tool to improve community welfare. APBD can reflect the real needs of the community according to existing potential and meet regional budget demands. The implementation of measurement by calculating financial ratios consists of several parts of measurement referring to local revenue, to measure financial independence, several financial ratios are needed. The Independence Ratio describes the dependence or independence of the region on external funds. The Effectiveness Ratio describes the ability of the Regional Government to realize PAD (Local Revenue) planned compared to the target set based on the real potential of the region. The Efficiency Ratio compares the amount of costs incurred to obtain revenue with the realized revenue received. Based on the calculation results, the value of the independence ratio is categorized as moderate and in a participation relationship pattern because it is between 50% - 57% in 2021-2024, because it is not too dependent on the central government and is quite capable of carrying out regional autonomy. The results of the effectiveness ratio are categorized as ineffective because it is less than 75%. Based on the effectiveness ratio, it is known that the ability of the region in carrying out tasks is not yet effective. The results of the Efficiency Ratio are categorized as very efficient because it is <5% of financial performance at the Village Financial and Asset Management Agency in terms of efficiency ratio.*

**Keywords:** Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat dalam hal keuangan berupa dana transfer, hal tersebut tentunya didukung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah tentunya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, kemampuan daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusahakan, mengelola serta mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat (Siregar, 2020).

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2019:82). Untuk menjaga kualitas kredibilitas laporan keuangan maka analisis tersebut membutuhkan teknik dan cara tertentu yang sesuai agar kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemegang kebijakan dan pengambilan keputusan.

Ada beberapa teknik analisis untuk menganalisis laporan keuangan, seperti analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melakukan perhitungan menggunakan rasio keuangan dimana analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil elemen laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ketahun (Harahap, 2020).

Kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan daerah. Pelaksanaan pengukuran dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian pengukuran mengacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan dibutuhkan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi (Mahmudi, 2019).

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrument yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah (SeptiRindawati, 2021:2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termuat didalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar penganggaran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawabannya yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2018).

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan

sector publik yang lebih transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas. Maka dari itu di perlukan laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu melakukan otonomi daerah yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisna & Susanto, 2010).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dan membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja pemerintah daerah, salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014:231).

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk member informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat oleh lebih umum dan sederhana agar lebih mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda, padahal semua pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantudengan analisis laporan keuangan untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis metode keuangan (Mahmudi, 2019).

## METODE PENELITIAN

### a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Enau, Sekertaris Desa Sungai Enau, Bendahara Desa Sungai Enau. Pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh dari APBDes tahun 2021-2024, yang kemudian dibaca dan dipahami oleh peneliti.

### b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah antaranya;

#### 1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %
Sangat Reandah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%

**Tinggi**                      75% - 100%

---

2. Rasio Keserasian

1) Rasio Belanja Rutin =  $\frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$

2) Rasio Belanja Modal =  $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio belanja modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

$\frac{\text{Pendapatan} / \text{pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan} / \text{pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{Pendapatan} / \text{pengeluaran tahun sebelumnya}}$

3) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap tahunnya.

4) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi =  $\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau *output* (biaya) yang dihasilkan dengan *input* (pendapatan) yang digunakan. Tingkat efisiensi dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	<60%

5) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD Berdasarkan Potensi Rill}} \times 100\%$

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan atas dasar potensi rill. Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996. Sebagai berikut

Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

Desa Sungai Enau yang terletak di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupateb Kubu Raya memiliki masyarakat yang aktif dan produktif dalam menjalankan hidup sehari-hari. Aktivitas masyarakat didesa ini sangat beragam, namun tetap berakar kuat pada potensi lokal dan kearifan budaya yang dimiliki.

Masyoritas warga menggantungkan hidup dari sector perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber mata pencarian utama, setiap pagi para kepala keluarga dan pekrja kebun sawit berangkat kelahan sawit memanen buah sawit, membersihkan semak-semak atau merawat tanamannya. Hasil dari kebun ini menjadi penggerak ekonomi keluarga dan keseluruhan. Selain berkebun sawit, sebagian masyarakat juga berjualan diwarung, pasar keliling, atau membuka usaha kecil seperti menjual makanan, sembako, hingga pakaian.

Kegiatan berdagang ini umumnya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai bentuk kontribusi ekonomi tambahan bagi keluarga, usaha mikro ini menjadi salah satu penopang perekonomian lokal yang terus berkembang. Tak hanya itu, beberapa warga juga memilih untuk berkebun tanaman lain seperti pisang, sayuran, singkong dan dan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah mereka hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi atau dijual dalam skala kecil di lingkungan sekitar.

Ini lah kearifan lokal dan budaya yang di miliki oleh Desa Sungai Enau yang tidak banyak orang luar ketahui keindahan dan kenyamanan hidup didesa, jadi saya memilih desa sungai enau untuk untuk peneliti skripsi saya yang dimana Penelitian ini meneliti tentang Analisis Rasio Keuangan Angara Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Desa Sungai Enau.

Yang di mana penelitian ini di lakungan dengan mewawancarai staf bagian pemegang keuangan. Penelitian ini dilaksanakan selama seminggu pada jam 10:00 sampai selesai, penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 juli 2025 yang berlokasi di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kubu Raya Kuala Mandor B.

### Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil penelitian ini rasio kemandirian adalah perbandingan antara pendapatan asli darah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kmandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan bayar pajak dan restribusi sebagai sumber pndapatan yang diperlukan daerah. (Harmoviansa, 2020) Dengan perhitungan sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Desa sungai enau mendapatkan bantuan dana eksternaldari dana desa, sedangkan bantuan dana dari kabupaten disebut ADD (Alokasi Dana Desa). Desa Sungai Enau juga mendapatkan dana bantuan selain dari kabupaten dan 2021-2024:

#### Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Sungai Enau

Tahun	PAD	Bantuan pusat	presentase
2021	57.728.000,00	2.198.816.000,00	20,62%
2022	67.549.000,00	2.273.823.000,00	29,70%
2023	27.033.000,00	2.247.316.000,00	12,02%
2024	78.293.000,00	2.390.373.000,00	32,45%

Berdasarkan table 1 diatas, terlihat bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa sungai enau tahun anggaran 2021-2024 tingkat kemandiriannya dikatakan pola hubungan konsumtif (rendah), karena, sangat bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu melakukan otonomi daerah. Hal ini bias dilihat dari rasio kemndirian tahun 2021 sebesar 20,62%, yang termasuk ke dalam kategori rendah sekali. Untuk tahun 2022 mengalami kenaikan 29,70%, pada tahun 2023 di kategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif. Pada tahun 2024 di kategorikan rendah dimana pola hubungan konsumtif karena berada diantara 25%- 50%.

### Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapat asli daerah yang direncanakan apakah bias memenuhi tujuan diterapkan sehingga efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai, semakin besar kostribusi hasil terhadap harapan atau tujuan ataupun target dari suatu kegiatan maka semakin efektif suatu organisasi tersebut. (Ambar, 2020) Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Realisasi pendapatan asli Desa Sungai Enau sesuai yang tercantum di APBDes tahun 2021-2024, sedangkan target pendapatan asli desa yang riil sesuai yng tercantum diRPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Berikut data olahan dari APBDes Desa Sungai Enau Tahun 2021-2024.

Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Sungai Enau			
Tahun	Realisasi PADes	Target PADes	Presentase
2021	57.728.000,00	57.728.000,00	100%
2022	67.549.000,00	67.549.000,00	100%
2023	27.033.000,00	27.033.000,00	100%
2024	78.293.000,00	78.293.000,00	100%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada table 4.2 hasil perhitungan rasio efektivitas desa sungai enau yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa kemampuan kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset desa sungai enau ditinjau dari rasio efektivitas dikatakan sangat efektif dalam merealisasikan pemerintahan daerah desa sungai enau diawali pada tahun 2021 dan 2024

### Rasio Efisiensi

Rasi efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. (Primandita Fitriandi 2020). Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi belanja daerah untuk menghitung rasio efisiensi menggunakan total keseluruhan belanja pada APBDes Desa Sungai Enau periode tahun 2021-2024. Realisasi pendapatan daerah menggunakan APBDes Desa Sungai Enau periode tahun 2021-2024. Berikut data olahan dari APBDes Desa Sungai Enau Tahun 2021-2024.

**Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Sungai Enau**

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Presentase
2021	2.392.122.568,00	2.492.793.000,00	95,96%
2022	2.301.547.642,00	2.316.730.954,00	99,34%
2023	2.257.943.500,00	2.270.849.000,00	99,43%
2024	2.613.182.000,00	2.653.240.542,00	98,49%

Dari tabel 4.3 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah pada tahun 2021 sebesar 96,96%, pada tahun 2022 sebesar 99,34% pada tahun 2023 sebesar 99,43% pada tahun 2024 sebesar 98,49%. Kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset desa dari rasio efisiensi, dikategorikan sangat efisiensi, karena kemampuan daerah desa sungai enau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kategori rasio efisiensi apabila yang dicapai minimal 1 (satu) atau dibawah 100 persen dikatakan sangat efisiensi.

**Rasio Keserasian**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian ini yaitu: Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Modal.

Rumus:

$$\text{a) Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Tota APBDes}} \times 100\%$$

$$\text{b) Realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$$

Belanja rutin merupakan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yang memberikan jangka pendek, seperti gaji pegawai dan operasional. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan, perbaikan atau peningkatan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang seperti pembelian tanah, gedung dan peralatan

**a. Perhitungan Rasio Belanja Rutin**

Tahun	Belanja Rutin	Total APBDes	Presentase
2021	2.334.743.420,00	2.334.171.465,00	24,75%
2022	2.316.730.954,00	2.329.920.954,00	99,43%
2023	2.270.894.000,00	2.294.222.312,00	98,98%
2024	2.468.724.812,00	2.508.724.812,00	98,40%

Perhitungan diatas terlihat bahwa perhitungan rasio belanja rutin pada tahun 2021 24,75%, pada tahun 2022 sebesar 99,43%, pada tahun 2023 98,98%, pada tahun 2024 sebesar 98,40%

**b. Perhitungan Belanja Modal**

Tahun	Belanja Modal	Total APBDes	Presentase
2021	1.035.551.000,00	2.334.171.465,00	44,36%
2022	141.827.756,00	2.329.920.954,00	60,87%
2023	686.720.500,00	2.294.222.312,00	29,93%
2024	885.073.700,00	2.508.724.812,00	35,27%

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa perhitungan rasio belanja modal pada tahun 2021 sebesar 44,36%, pada tahun 2022 sebesar 60,87%, pada tahun 2023 sebesar 29,93%, pada tahun 2024 sebesar 35,27%.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah icapai dari satu period eke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensipotensi mana yang perlu mendapatk perhatian (Abdul Halim, 2018). Rasio pertumbian dapat dihitung dengan rumus berikut:

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan} / \text{Pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan} / \text{pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{Pendapatan} / \text{Pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

#### Pendapatan / Pengeluaran tahun sebelumnya

Pendapatan Desa Sungai Enau yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah total pendapatan, sedangkan pengeluaran yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah pengeluaran belanja rutin dan belanja pembangunan. Berikut data olahan APBDes Desa Sungai Enau Tahun 2021-2024.

##### a. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Total Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Pendapatan%
2021	2.334.171.465,00	-
2022	2.329.920.954,00	20,54%
2023	2.294.222.312,00	15,32%
2024	2.508.724.812,00	10,83%

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Desa Sungai Enau diatas terlihat bahwa pendapatan pada tahun 2022 sebesar 20,54% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 15,32% pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 10,83%.

##### b. Perhitungan Rasio Pertumbuhan belanja

	2021	2022	2023	2024
<b>Belanja Rutin</b>	2.334.743.420,00	2.316.730.954,00	2.270.849.000,00	2.468.724.812,00
<b>Belanja Modal</b>	1.035.551.000,00	141.827.756,00	686.720.500,00	885.073.700,00
<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin (%)</b>	-	77,14%	19,80%	87,71 %
<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)</b>	-	83,30%	3,84%	28,88 %

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja rutin pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 77,14%, pada tahun 2023 menurun menjadi 19,80% dan naik kembali pada tahun 2024 menjadi 87,71%. Pertumbuhan belanja modal pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 83,30%, dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 3,84%, mengalami kenaikan lagi di tahun 2024 menjadi 28,8%.



## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menggunakan rasio keuangan pada APBDes pemerintah Desa Sungai Enau maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### Hasil Perhitungan Kemandirian

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Kemandirian	20,62%	29,70%	12,02%	32,45%
Kriteria	instruktif	konsultatif	instruktif	konsultatif

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang di dapatkan bahwa rasio kemandirian Desa Sungai Enau bias dikatakan rendah dikarenakan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang sangat minim yang membuat desa sangat bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pengelolaan dana desa yang tidak optimal dan kurang transparan masalah sumber daya manusia. Solusi yang dapat diambil dari rendahnya kemandirian suatu desa adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi serta memperbaiki manajemen keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola pendapatan, meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan dan mengadopsi teknologi dalam pemungutan pendapatan daerah.

### Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Efektivitas	100%	100%	100%	100%
Kriteria	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif

Disini bisa kita lihat dalam suatu perhitungan rasio efektivitas Desa Sungai Enau dikategorikan sangat efektif dikarenakan berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga mencapai 100% efektivitasnya.

### Hasil Perhitungan Efisiensi

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Efisiensi	95,96%	99,34%	99,43%	98,49%
Kriteria	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien

Berdasarkan dari hasil yang didapat dari perhitungan rasio efisiensi dikategorikan efisien karena realisasi belanja sesuai atau mendekati anggaran yang direncanakan dan memberikan manfaat yang signifikan serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya (baik dan, sumber daya manusia, maupun alam) .

### Hasil Perhitungan Keserasian

#### a. Hasil Rasio Belanja Rutin

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Keserasian	24,75%	99,43%	98,98%	98,40%

Dapat kita lihat dari perhitungan rasio belanja rutin bahwa tahun terakhir senilai 98,40% yang bias dibidang proporsi tinggi karena sebagian besar anggaran daerah habis terserap untuk kegiatan rutin dan operasional.

#### b. Hasil Rasio Belanja Modal

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio Keserasian	44,36%	60,87%	29,93%	35,27%

Dalam perhitungan rasio belanja modal pada tahun terakhir menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap investasi dalam aset (seperti tanah, gedung, jaringan, dan peralatan) yang memberikan manfaat jangka panjang dan jauh dari kategori sangat baik.

### Perhitungan Rasio Pertumbuhan

#### a Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan

Indikator	2022	2023	2024	2022
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	20,54%	15,32%	10,83%	20,54%

Nilai hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dianggap baik karena hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan perkembangan aktivasi ekonomi di Desa Sungai Enau.

#### b Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja

Indikator	2022	2023	2024
Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin (%)	77,14%	19,80%	87,71%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)	83,30%	3,84%	28,88%

Pada rasio pertumbuhan belanja Desa Sungai Enau tingkat pertumbuhan belanjanya pada tahun terakhir sangat tinggi karena disebabkan oleh peningkatan signifikan sumber pendapatan desa, khususnya melalui transfer dana desa dari pemerintah pusat yang disertai dengan tuntutan dan prioritas pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di desa.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan daerah dengan rasio keuangan daerah yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk untuk rasio kemandirian pada tahun 2021-2024 masuk dalam kategori rendah sekali, karena hasil pengukuran yang berada di posisi 0% - 25%. Pengukuran pada rasio efektivitas pada tahun 2021-2024 masuk dalam kategori tidak sangat efektif karena hasil pengukuran 100%. Pengukuran efisiensi masuk kedalam kategori efisien, karena hasil pengukuran 90%-100% pada tahun 2021-2024. Pengukuran rasio keserasian untuk belanja rutin di peroleh 99,43% pada tahun 2022, pengukuran rasio keserasian untuk belanja modal diperoleh 60,87% pada tahun 2022. Perhitungan pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan di peroleh 20,54% pada tahun 2022, perhitungan pertumbuhan belanja pada belanja rutin diperoleh 87,71% pada tahun 2024, perhitungan pertumbuhan belanja pada belanja modal diperoleh 83,30% pada tahun 2022.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akutansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Hamil. 2000 : 4. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi : CV Jejak
- Dr. Rudy Badrudin. (2017 : 98). Ekonomika Otonomi Daerah Edisi -2. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Halim (2004 : 283-291). Akutansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim. (2004:188-189). Akutansi Sektor Publik, Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta : Selemba Empat
- Harahap, H.F., (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis : Jurnal Of economic and Business. 4(1), 34-38.
- Harmovinsah, dk. Akutansi Publik. Surabaya : Scorbindo Media Pustaka, 2020.
- Hasibuan. (2007 : 94). Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Kinerja. Jakarta.
- IAI-Kompartemen Akutansi Sektor Publik-Bidang Akutabilitas Sektor Publik. 2002 : 94.
- IAI-Kompartemen Akutansi sektor Publik-Bidang Akutabilitas Sektor Publik. 2004:4.
- Indra Bastian. 2007:308 Sistem Akutansi Sektor Publik. Jakarta : Rineka Cipta
- Indra Bastian. 2010:191 Akutansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga
- Mahmudi, 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Mamesah, D.J. (1995:20) Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta :Gramedia Pustaka
- Mamesah, D.J.(1995:20-21). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Mardiasmo. (2002:9). Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta:AndiOffset.
- Primandita, dkk. Bunga Rampai Keuangan Negara, Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020.
- Ramadhan. (2021:11). Metode Penelitian ,Surabaya : Cipta Media Nusantara
- Sudarmayanti.2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit Ilham Jaya : Bandung
- Septi Rindawati, (2021:2). Responsibilitas Pengelolaan APBD Media Scens Indonesia.
- Siregar, A.O.D., &S,I, 2020. “ Analisis kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Depok-Jawa Barat)”, Jurnal Image
- Sudarmayanti. (2003:147). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit Ilham Jaya : Bandung
- Susanto, H. (2019:82). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram, Distribusi Jurnal Of Management and Business, 7(2).